



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

EDISI XXVII

Mei 2022

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

SINERGI PENDANAAN



Astera Primanto Bhakti • Mariatul Aini • Purwanto • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Kindy R. Syahrir • Imam Mukhlis Affandi • Britany Alasen Sembiring • Ilham Hadiana • Purwandi Santoso
Isnanto Wimborro Dahrojatun • Catur Panggih Pamungkas • Poppy Suprapti • Irfan Sofi • Sigit Wahyu Kartiko
Ganjar Prihatmoko • Nanag Garendra Timur • Amrul Yusroni • Rossi Rizki Bestari • Dimas Agung Nugraha
Narits Muhammad Syafruddin • Desy Puspita A. • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa
Selma Syifa Khoirunnisa • Khishbatur Rizqiyah • Netta An'amta Desli Sanati



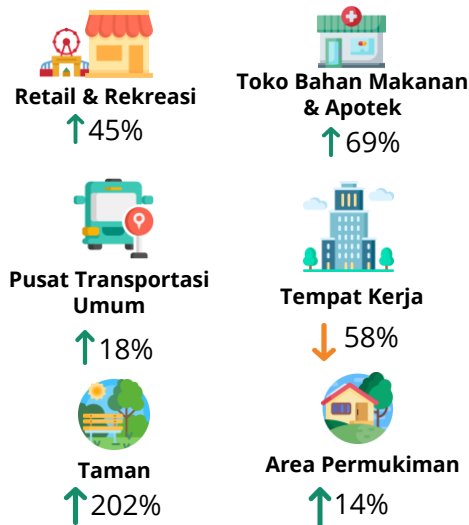
3	<i>Highlight</i>
4	Kondisi Perekonomian Daerah
5	Kinerja Fiskal Daerah
8	Kinerja Daerah
16	Inovasi Daerah
20	Kabar Daerah
22	Editorial
25	Kajian Pilihan

HIGHLIGHT

- Secara umum kondisi perekonomian daerah pada periode 24 Maret – 5 Mei 2022 mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari mobility index di mana terjadi peningkatan signifikan pada tren mobilitas di taman umum serta penurunan aktivitas di tempat kerja akibat periode cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Di Jawa Tengah dan Sumatera Barat terjadi peningkatan aktivitas retail dan rekreasi yang diduga sebagai sinyal adanya peningkatan aktivitas ekonomi akibat kegiatan mudik lebaran.
- Adapun, pada Bulan April 2022, secara umum Indonesia mengalami inflasi sebesar 0.95% akibat kenaikan harga pada komoditas bensin dan minyak goreng.
- Kinerja tingkat penyaluran TKD tertinggi terjadi pada penyaluran DID (naik 12,7%) dibandingkan dengan TA 2021 (YoY). Hal ini disebabkan telah disalurkan 50% Alokasi DID kepada 72 Pemda, sementara sampai dengan periode yang sama tahun 2021 hanya terdapat 30 Pemda. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kinerja pemda.
- Kontraksi belanja daerah hampir merata terjadi di seluruh wilayah. Hanya wilayah Aceh saja yang mengalami pertumbuhan positif (YoY) belanja daerah hingga April 2022 ini. Dari sisi komponen belanjanya, hampir di seluruh wilayah, belanja pegawai memberikan sumbangan tertinggi pada penurunan belanja daerah akibat tertundanya pembayaran TPP.
- Kinerja daerah yang menjadi topik pada edisi kali ini adalah sinergi pendanaan untuk mendukung kinerja penanganan stunting. Sebelum tahun 2017, penanganan stunting lebih banyak dibiayai oleh APBD, pada tahun 2017 dan setelahnya APBN melalui kementerian dan lembaga mulai lebih banyak mendanai belanja stunting dengan porsi secara umum lebih dari 30% dan meningkat menjadi lebih dari 40% pada 2018.
- Inovasi daerah yang dibahas dalam edisi kali ini adalah contoh sinergi pendanaan Pusat-Daerah dalam Pembangunan RSUD Provinsi Sulawesi Utara. Pada proyek tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan sinergi pendanaan yang terdiri dari APBD, APBN, Hibah, dan Pinjaman PT SMI (Persero) dengan anggaran pembangunan sebesar Rp 304 miliar yang telah rampung di Juni 2021.
- Dalam topik Kabar Daerah, disajikan mengenai contoh sinergi pendanaan yang telah dilakukan di daerah contohnya Pada 2022, Kemendikbudristek menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kerja sama MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dengan pendanaan matching fund sebesar Rp 905 miliar.
- Pada halaman Editorial, dibahas mengenai konsepsi sinergi pendanaan yang pada dasarnya, untuk mengatasi keterbatasan aspek ruang lingkup (scope), horizon waktu (time), dan biaya (cost) suatu proyek infrasktruktur. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut dibutuhkan pengungkit (leverage) kemampuan pendanaan daerah dalam kapasitas besar untuk mendesain proyek infrastruktur yang proper dan program prioritas lainnya.
- Terakhir, dalam Kajian Pilihan disajikan kajian terkait Relevansi Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 dalam Meminimalkan Deviasi Penurunan Pertumbuhan PDRB dari Trajektori Ekonomi Potensial Pasca Pandemi COVID 2019.

KONDISI PEREKONOMIAN

Mobility Index Nasional*



Berdasarkan *mobility index* pada periode 24 Maret – 5 Mei 2022, secara umum di seluruh wilayah Indonesia terdapat peningkatan aktivitas ekonomi kecuali pada tempat kerja yang mengalami penurunan drastis akibat adanya kebijakan cuti bersama tanggal 29 Maret hingga 6 Mei 2022. Peningkatan tertinggi terjadi pada tren mobilitas di tempat terbuka seperti taman umum sebesar 202%. Hal ini diduga akibat adanya libur panjang Hari Raya Idul Fitri yang sebagian masyarakat melaksanakan ibadah shalat ied di lapangan terbuka. Secara spasial, berdasarkan grafik mobilitas, sebagian besar provinsi mengalami tren yang sama yakni peningkatan aktivitas di taman dan penurunan aktivitas di tempat kerja akibat libur Hari Raya Idul Fitri. Di Jawa Tengah dan Sumatera Barat bahkan terjadi peningkatan aktivitas retail dan rekreasi sebesar lebih dari 110% yang diduga sebagai sinyal adanya peningkatan aktivitas ekonomi akibat kegiatan mudik lebaran.

Sumber: *Community Mobility Reports, 2022*

*dibandingkan dengan *baseline* per 3 Jan- 6 Feb 2020 (sebelum COVID-19)

Highlight Indikator Bulanan

Kunjungan Wisman Maret 2022



Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk utama pada Maret 2022 mencapai 40,79 ribu kunjungan, naik 206,5% dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman dari pintu masuk utama pada Maret 2021. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman dari pintu masuk utama pada Maret 2022 juga meningkat sebesar 121,02%. Dibukanya pintu mancanegara dan pelonggaran peraturan mobilitas masyarakat membuat sektor pariwisata kembali tumbuh.

Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2022*

Inflasi April 2022 (MoM)

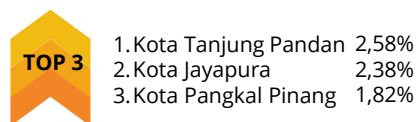


Pada bulan April 2022, Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,95 persen. Inflasi pada April 2022 terjadi karena meningkatnya harga indeks kelompok pengeluaran seperti transportasi sebesar 2,42 persen serta makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,76 persen. Inflasi bulan April dipicu oleh kenaikan harga pada komoditas bensin dan minyak goreng.

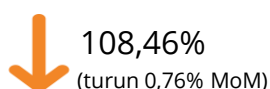
Dari 90 Kota IHK, 3 daerah yang mengalami inflasi tertinggi adalah Kota Tanjung Pandan, Kota Jayapura, dan Kota Pangkal Pinang dengan inflasi masing-masing sebesar 2,58 persen, 2,38 persen, dan 1,82 persen. Inflasi di ketiga daerah tersebut diakibatkan oleh meningkatnya indeks kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau yang berasal dari komoditas minyak goreng dan ikan.

Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2022*

DAERAH INFLASI TERTINGGI



Nilai Tukar Petani April 2022

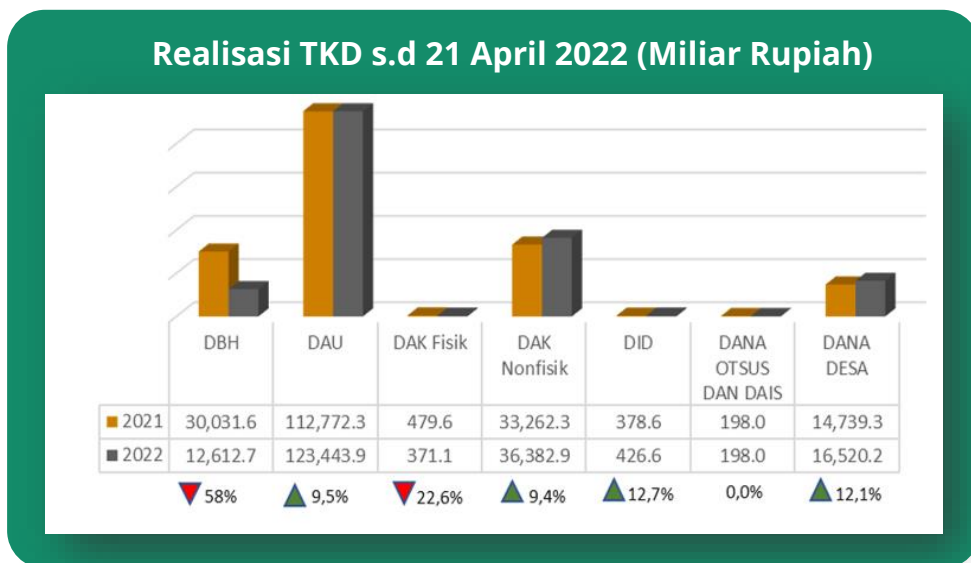


Dari 34 provinsi, sebanyak 20 provinsi mengalami penurunan NTP, 14 provinsi mengalami kenaikan NTP. Penurunan NTP tertinggi pada April 2022 terjadi di Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 2,21%, sedangkan kenaikan NTP terbesar terjadi di Kalimantan Barat yaitu sebesar 1,44%. Kenaikan NTP di Provinsi Kalimantan Barat disebabkan oleh meningkatnya komoditas kelapa sawit.

Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2022*

KINERJA FISKAL DAERAH

Kinerja TKD

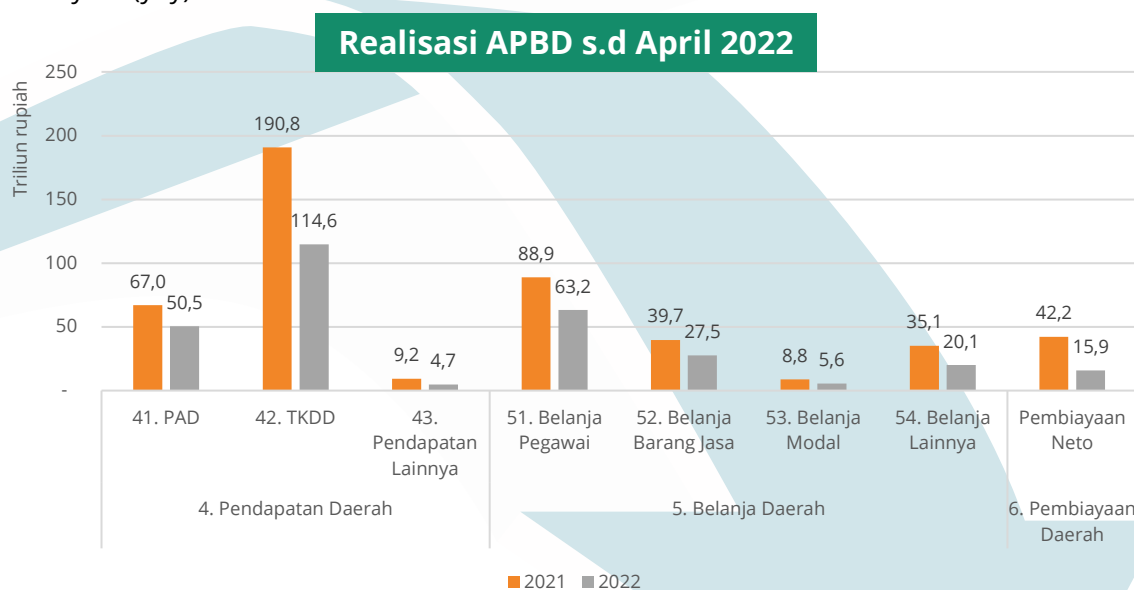


- Penyaluran TKD s.d. 21 April 2022 **secara nominal** lebih rendah, yaitu sebesar **Rp 189,95 Triliun**, dibandingkan TA 2021 (YoY) yang sebesar **Rp 191,86 Triliun**, namun **secara tingkat penyaluran** lebih tinggi yaitu sebesar **24,7%** dibandingkan TA 2021 yang hanya sebesar **24,1%** terhadap total alokasi TKD.
- Kinerja penyaluran TKD tertinggi terjadi pada penyaluran DID (naik 12,7%) dibandingkan dengan TA 2021 (YoY). Hal ini disebabkan telah disalurkan 50% Alokasi DID kepada 72 Pemda, sementara sampai dengan periode yang sama tahun 2021 hanya terdapat 30 Pemda.
- Penurunan nominal penyaluran TKD terbesar terdapat pada DBH (turun 58%) dibandingkan dengan TA 2021 (YoY). Hal ini disebabkan pada tahun 2021 terdapat percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH Tahun 2020 sebesar Rp9,9 Triliun. Biasanya penyelesaian Kurang Bayar tahun sebelumnya dilakukan setelah hasil audit BPK. Namun pada tahun 2021, sebelum audit BPK, dilakukan penyaluran Kurang Bayar DBH TA 2020 sementara pada bulan Maret dalam rangka percepatan penyaluran Kurang Bayar. Selain itu, pada bulan Februari juga terdapat penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan TA 2019 sebesar Rp6 Triliun.
- Sekitar 37,81% TKD TA 2022 atau sebesar Rp290,98 triliun dialokasikan untuk mendukung sektor Pendidikan. Sampai dengan 21 April 2022 terdapat realisasi sebesar 28,22% atau sebesar Rp82,1 triliun yang bersumber dari DAU Rp50 triliun, DAK Nonfisik Rp46 triliun, DAK Fisik Rp91 miliar, dan DID Rp107,6 miliar.
- Sekitar 4,56% TKD TA 2022 atau sebesar Rp35,1 triliun dialokasikan untuk mendukung sektor Kesehatan. Sampai dengan 21 April 2022 terdapat realisasi sebesar 16,83% atau sebesar Rp5,9 triliun, yang bersumber dari DAK Nonfisik Rp4,7 triliun, Dana Desa Rp910 miliar, DID Rp200 miliar, dan DAK Fisik Rp0,4 miliar.
- Jenis TKD yang dialokasikan untuk perlindungan sosial yaitu berupa BLT Desa. BLT Desa juga dimaksudkan untuk mendukung program Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Untuk tahun 2022, BLT Desa dialokasikan sebesar Rp27,2 triliun yang akan dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat sebesar Rp300.000,- per bulan, yang penyalurannya dilaksanakan secara triwulanan. Sampai dengan 21 April 2022 BLT Desa telah disalurkan sebesar R2,41 triliun atau 21,81% dari alokasi.
 - Dukungan TKD untuk infrastruktur tahun 2022 mencapai Rp91,96 triliun atau 11,95% dari total alokasi TKD. Sampai dengan 21 April 2022 terdapat realisasi sebesar Rp 17,32 triliun (18,84%) yang berasal dari DTU yang di-earmarked sebesar Rp60,8 triliun dan DAK Fisik sebesar Rp26,8 triliun.
 - Perencanaan dan pelaksanaan TKD juga menjadi bagian dalam proses sinergi antara belanja pusat dengan belanja daerah. Sinergi tersebut dilakukan melalui pembagian kewenangan pendanaan dan juga sinergi TKD dengan belanja Kementerian/Lembaga. Melalui sinergi tersebut diharapkan output dari TKD khususnya DAK Fisik dapat sejalan dengan output belanja K/L.

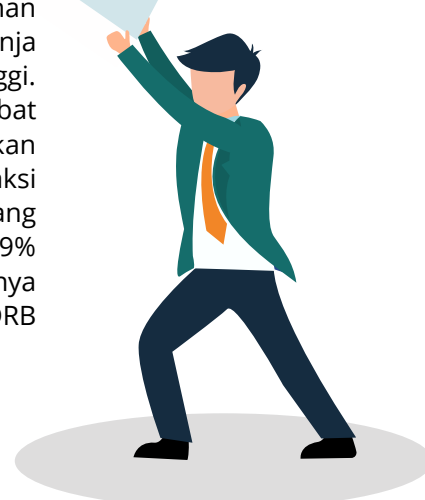
KINERJA FISKAL DAERAH

Kinerja APBD¹

Masih sama dengan periode sebelumnya, realisasi APBD hingga periode April mengalami perlambatan baik realisasi pendapatan maupun belanja serta pembiayaan. Secara kumulatif, realisasi pendapatan pada April 2022 mengalami penurunan hingga 36,4% dari Rp266,95 triliun di periode yang sama tahun lalu menjadi hanya Rp169,78 triliun. Transfer Ke Daerah (TKD) memberikan pengaruh penurunan pendapatan yang paling signifikan. Selain karena dominasinya pada pendapatan, TKD juga mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga 39,9% year on year (yoy).



Penurunan pendapatan juga diikuti dengan penurunan belanja hingga 32,6%. Realisasi pada april ini hanya sebesar Rp116,4 triliun menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp172,6 triliun. Komponen belanja lainnya mengalami pertumbuhan negatif paling dalam hingga mencapai 42,7% yoy. Namun demikian, jika dihitung dari kontribusinya, belanja pegawai memberikan kontribusi yang paling tinggi pada penurunan belanja secara kumulatif. Selain karena proporsinya terhadap belanja yang paling besar, tingkat penurunan belanja pegawai juga cukup tinggi. Persentase penurunannya mencapai 29% yoy. Salah satunya akibat belanja tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang belum terbayarkan sepenuhnya. Adapun belanja pegawai berkontribusi pada kontraksi belanja daerah sebesar 14,9%. Sementara itu, kontribusi belanja barang jasa, belanja modal dan belanja lainnya berturut - turut adalah 7,1%, 1,9% dan 8,7%. Dampak dari kontraksi belanja daerah ini khususnya pada belanja dan pegawai tentu akan berdampak pada PDB/PDRB terutama pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah.

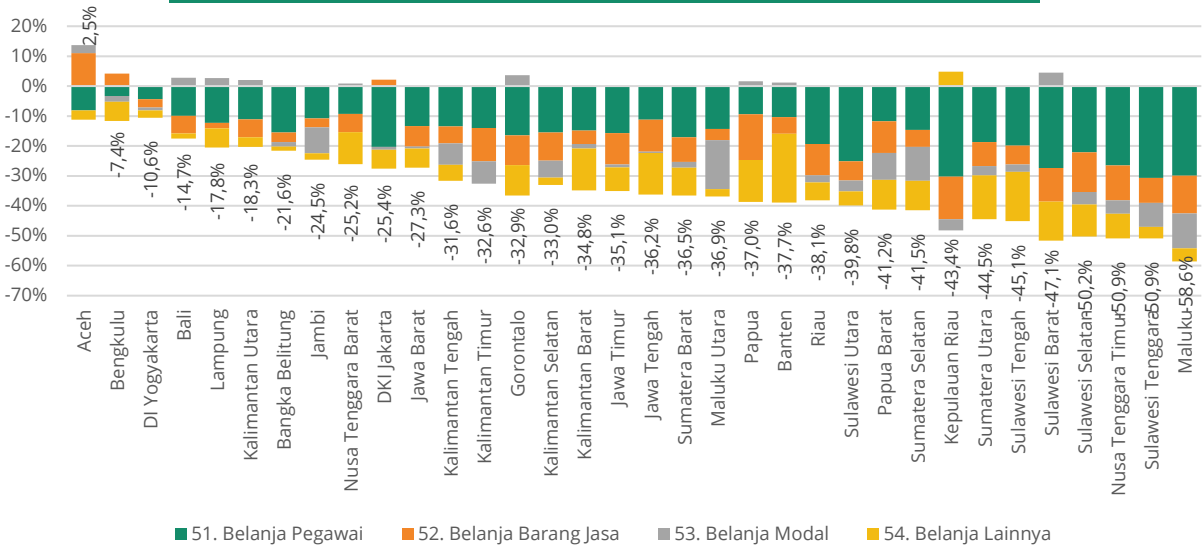


¹ Data yang digunakan merupakan realisasi APBD periode april 2022 per 9 Mei 2022 yang terkumpul sebanyak 483 daerah

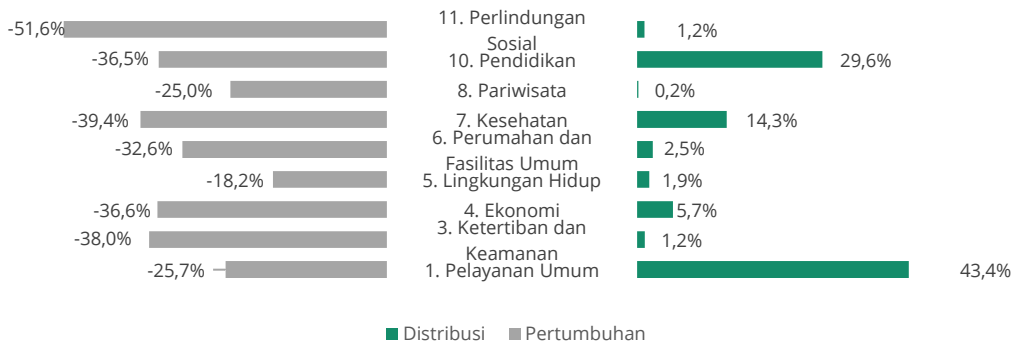
KINERJA FISKAL DAERAH

Kontraksi belanja daerah hampir merata terjadi di seluruh wilayah. Hanya wilayah Aceh saja yang mengalami pertumbuhan positif (yoy) belanja daerah hingga April 2022 ini. Selain itu, dari 34 wilayah provinsi, terdapat 22 wilayah mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan kumulatif nasional. Dari sisi komponen belanjanya, Hampir di seluruh wilayah, belanja pegawai memberikan sumbangan tertinggi pada penurunan belanja daerah year on year. Fenomena tertundanya pembayaran TPP hampir terjadi di seluruh daerah sehingga memicu kontraksi belanja pegawai.

Sumber Pertumbuhan Belanja Daerah Menurut Wilayah²



Berdasarkan klasifikasi fungsi, terlihat belanja daerah setiap fungsi mengalami kontraksi yang cukup tinggi. Dari 9 fungsi dari APBD, 6 fungsi diantaranya mengalami kontraksi belanja melebihi kontraksi belanja daerah secara nasional yaitu diatas 32,6%. Fungsi perlindungan sosial mengalami laju penurunan yang paling tinggi dibandingkan fungsi lainnya. Hal ini menunjukkan perbedaan fokus penganggaran pada tahun 2022 ini dimana belanja dalam rangka perlindungan sosial seperti bantuan sosial tidak lagi menjadi prioritas, khususnya dalam penanganan covid-19.



Jika dilihat dari distribusi per fungsinya, realisasi belanja hingga April tahun berjalan ini didominasi oleh fungsi – fungsi yang dominan yaitu pelayanan umum, pendidikan dan kesehatan. Proporsi ketiga fungsi tersebut bahkan mencapai 87,3% terhadap realisasi anggaran. Dengan demikian sekaligus mengaskan ketiga fungsi itulah yang berkontribusi pada kontraksi belanja daerah. Fungsi pelayanan umum menyumbangkan 10,1% pertumbuhan negatif belanja daerah, 11,4% berasal dari fungsi Pendidikan dan 6,3% disumbangkan oleh fungsi kesehatan.

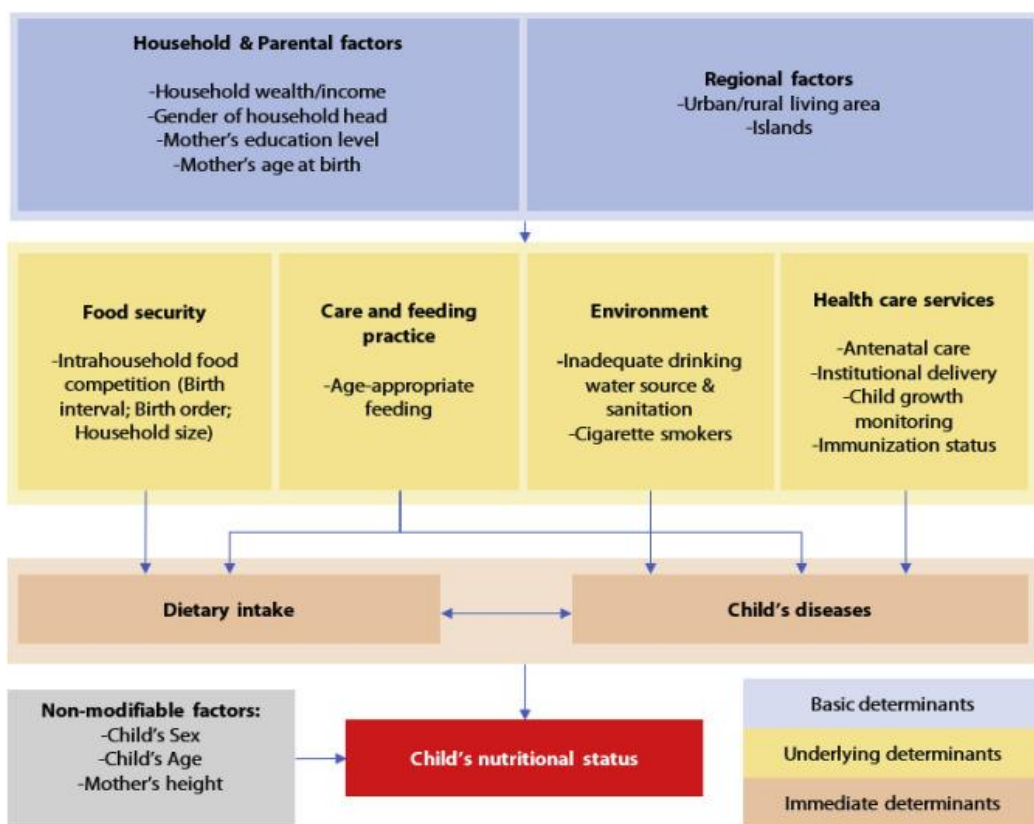
² Wilayah merupakan agregasi dari realisasi APBD provinsi, kabupaten dan Kota dalam wilayah provinsi bersangkutan

Peran TKD Mengatasi dan Memitigasi Stunting di Tingkat Kabupaten/Kota hingga ke Tingkat Desa di Tengah Pandemi Covid-19 dalam APBN 2020



Prevalensi pengekangan pertumbuhan anak (stunting) di Indonesia tetap tinggi selama dekade terakhir, menurut Kementerian Kesehatan, prevalensi anak-anak terhambat naik dari 35,6 persen pada 2010 menjadi 37,2 persen pada 2013. Apa pun di atas 20 persen menunjukkan tingkat keparahan kekurangan gizi yang tinggi, referensi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ada juga perbedaan besar di antara provinsi-provinsi Indonesia: 15 memiliki prevalensi mengejutkan lebih dari 40 persen, sedangkan sisanya antara 25 dan 40 persen. Anak-anak didefinisikan sebagai terhambat jika tinggi mereka untuk usia mereka di bawah standar pertumbuhan anak WHO. Mereka menderita nutrisi yang buruk, infeksi dan stimulasi psikososial yang tidak memadai, yang menghambat perkembangan mental mereka. Menurut penelitian kesehatan dasar, anak-anak yang menderita stunting mayoritas lahir dari keluarga pra-sejahtera. Prevalensi di antara yang pra-sejahtera hampir dua kali lebih tinggi dari yang mampu. Berikut anatomi faktor korelasi penyebab stunting menurut UNICEF (1990).

Bagan 12: Anatomi Faktor Korelasi Penyebab Stunting



(Sumber: Unicef, 1990)

KINERJA DAERAH

Stunting dapat menjadi tantangan utama bagi Indonesia pasca bonus demografi, namun sedikit yang memahami bahwa hal itu dapat menyebabkan kerugian dalam potensi sumber daya manusia dan ekonomi. Indonesia diproyeksikan memiliki populasi 306 juta pada tahun 2035, di mana populasi usia kerja akan menjadi 207 juta. Dua puluh tiga persen dari mereka akan berada di braket usia 15 hingga 24 tahun. Bila sebagian besar dividen demografis merupakan populasi yang mencapai produktivitas tinggi, yang tanpanya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi akan terbatas maka dividen demografis akan memiliki dampak signifikan pada pembangunan ekonomi negara itu hanya jika keterampilan kerja dan pengetahuan kaum muda dikembangkan. Ini tidak dapat terjadi jika banyak anak saat ini terus menderita pertumbuhan terhambat (stunting).

Anak -anak yang saat ini berusia 2 hingga 5 tahun akan berusia 19 hingga 22 tahun pada tahun 2035. Kelompok usia ini dikategorikan sebagai orang dewasa muda, siap memasuki pasar kerja dan mendorong ekonomi. Dari tahun 2030 hingga 2035, grup ini merepresentasikan bagian terbesar dari populasi Indonesia. Lebih jauh, untuk sejumlah besar anak -anak ini yang menderita stunting, setelah dewasa mereka akan lebih rentan terhadap penyakit kronis. Ini akan menyebabkan produktivitas rendah dan pencapaian pendapatan, membuat mereka rentan secara ekonomi.





Berbeda dengan bonus yang diharapkan untuk ekonomi Indonesia, skenario stunting ini akan menjadi bencana. Ini akan menambah tekanan pada anggaran nasional untuk mencakup jutaan warga negara yang berpotensi menganggur dan baru, melalui perluasan program antipoverty dan perlindungan sosial. Berdasarkan studi dari Bank Dunia, stunting mengurangi skor IQ sebesar lima hingga 11 poin, menghasilkan nilai yang lebih rendah di antara anak-anak sekolah. Gadis-gadis dengan pertumbuhan terhambat dari keluarga pra-sejahtera lebih cenderung melahirkan bayi yang juga terhambat. Ini melanggengkan lingkaran setan kepra-sejahteraan yang sulit untuk dipatahkan dan mengurangi potensi modal manusia di masa depan. Bank Dunia (2016) memperkirakan bahwa pengurangan 1 persen pada tinggi dewasa karena stunting berkorelasi dengan kerugian 1,4 persen dalam produktivitas ekonomi. Berdasarkan studi dari Bank Dunia tersebut, stunting mengurangi skor IQ sebesar 5 hingga 11 poin.

Studi juga menunjukkan bahwa anak-anak terhambat menghasilkan 20 persen lebih sedikit dalam pendapatan seumur hidup sebagai orang dewasa dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang tidak dibawakan, dan 30 persen lebih mungkin hidup dalam kepra-sejahteraan. Potensi kerugian ekonomi dari pengkhianatan kisaran dari US \$ 6,7 triliun hingga \$ 43,4 triliun per tahun, tergantung pada negara, menurut penelitian dari Departemen Ekonomi dan Sosiologi dan Pusat Studi Kependudukan di Universitas Pennsylvania. Melalui penelitian ini, para peneliti berusaha untuk memahami jalur yang melaluinya menguntungkan menyebabkan kerugian ekonomi dari, antara lain, berkurangnya produktivitas tenaga kerja dan biaya perawatan medis yang dihasilkan dari masalah kesehatan. Dengan demikian, kerugian untuk masing-masing negara akan bergantung pada sistem medis, pasar, dan kebijakan masing-masing. Manfaat ekonomi dari memiliki nutrisi yang lebih baik sangat besar bagi individu dan juga suatu negara. Menurut Bank Dunia, stunting dapat menyebabkan kerugian ekonomi 2 hingga 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) suatu negara per tahun. Untuk Indonesia, yang PDB-nya pada tahun 2017 adalah sekitar Rp 13.000 triliun (\$ 873 miliar), itu berarti kerugian sekitar Rp 260 triliun menjadi Rp 390 triliun per tahun.

Oleh karena itu, pemerintah telah merumuskan panduan konvergensi program/kegiatan percepatan pencegahan stunting bagi segenap organisasi perangkat daerah. Setiap tingkat pemerintahan baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa serta masyarakat dapat mengetahui peran yang dapat diambil untuk secara terkoordinasi bersama-sama

mempercepat pencegahan tengkes. Pada tulisan ini disajikan informasi mengenai (i) perkembangan statistik balita pendek dan sangat pendek, (ii) perkembangan Indeks Khusus Penanganan Stunting, dan (iii) potret sinergi pendanaan penanganan stunting, (iv) sebaran pendanaan penanganan stunting, dan (v) perbandingan alokasi anggaran pada daerah dengan kinerja baik, cukup baik, dan yang masih dapat ditingkatkan untuk mendapat gambaran bagaimana hal tersebut mungkin dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan terhadap penanganan balita stunting.

<https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.STNT.ME.ZS?locations=ID>



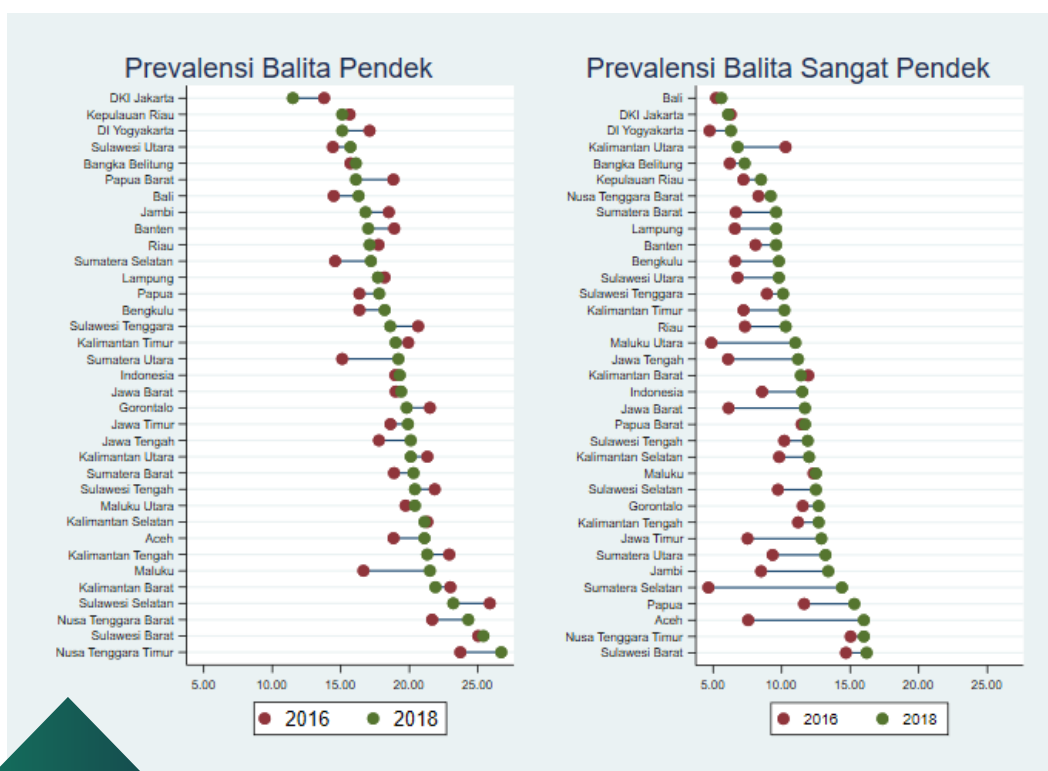
KINERJA DAERAH

Perkembangan Statistik Balita Pendek dan Sangat Pendek



Di tingkat nasional, pada tahun 2016 prevalensi balita pendek dan sangat pendek masing-masing adalah sebesar 18,97% dan 8,57%. Dua tahun kemudian, pada saat dirumuskan panduan konvergensi program/kegiatan percepatan pencegahan *stunting* angka tersebut meningkat menjadi 19,3% dan 11,5%. Secara urutan daerah dengan prevalensi balita pendek dan balita sangat pendek adalah sebagaimana disajikan pada Bagan 1. Prevalensi yang tinggi (di atas angka nasional) untuk balita pendek dan sangat pendek relatif menyebar dari Jawa Barat hingga Nusa Tenggara Timur. Namun demikian kinerja terbaik yang diindikasikan dengan penurunan prevalensi balita pendek ada di provinsi Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta masing-masing turun sebesar 2,73%, 2,67%, dan 2,28%. Sementara untuk prevalensi balita sangat pendek ada pada provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan DKI Jakarta, masing-masing turun sebesar 3,49%, 0,54%, dan 0,18%.

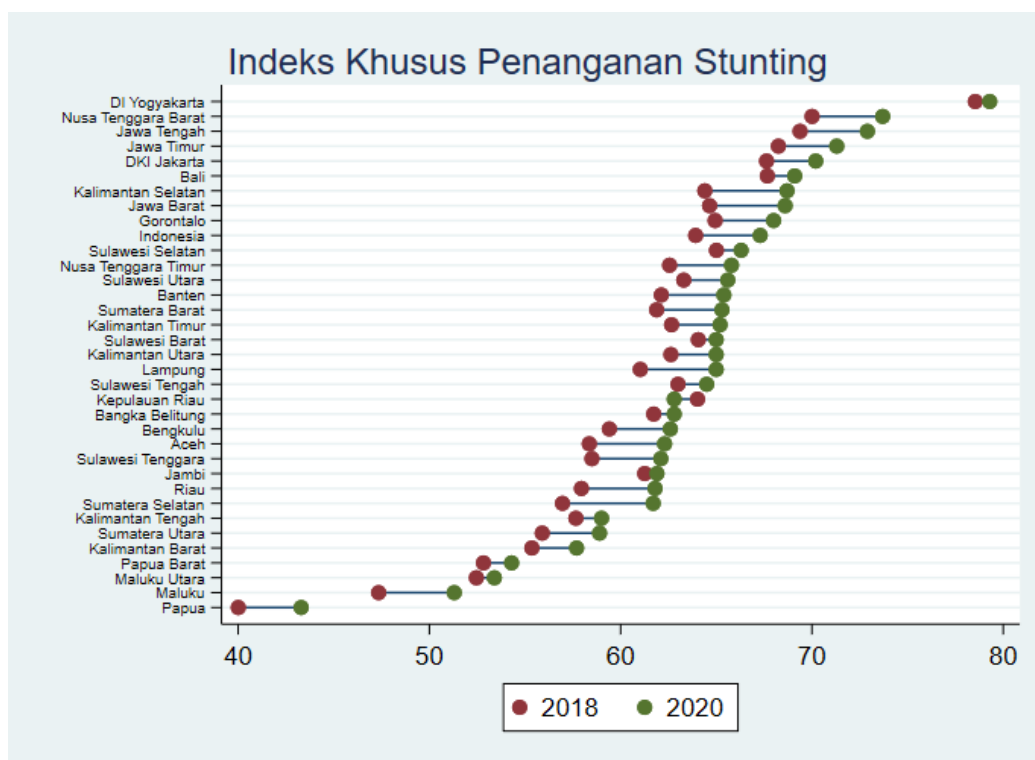
Bagan 2 Kinerja Penanganan Balita Pendek dan Sangat Pendek Tahun 2016-2018



Perkembangan Indeks Khusus Penanganan *Stunting*

Untuk mengukur kinerja penanganan *stunting*, pemerintah menggabungkan 12 indikator pada 6 dimensi yang dianggap relevan dengan objek pengukuran yang mencakup dimensi (i) kesehatan, (ii) gizi, (iii) perumahan, (iv) pangan, (v) pendidikan, dan (vi) perlindungan sosial. IKPS pertama kali diukur pada tahun 2018 dimana IKPS di tingkat nasional adalah 63,92% dan kemudian naik menjadi 66,08% pada tahun 2019 dan kembali meningkat menjadi 67,3% pada tahun 2020. Kinerja penanganan *stunting* mengalami peningkatan dalam kurun 2018-2020 antara 0,6% (Prov. Jambi) dan 4,74% (Prov. Sumatera Selatan) kecuali pada Prov. Kepulauan Riau yang turun 1,22% dari 64,02% pada tahun 2018 menjadi 62,8% pada 2020.

Bagan 3 Indeks Khusus Penanganan *Stunting* 2018 - 2020



KINERJA DAERAH

Potret Sinergi Pendanaan Stunting

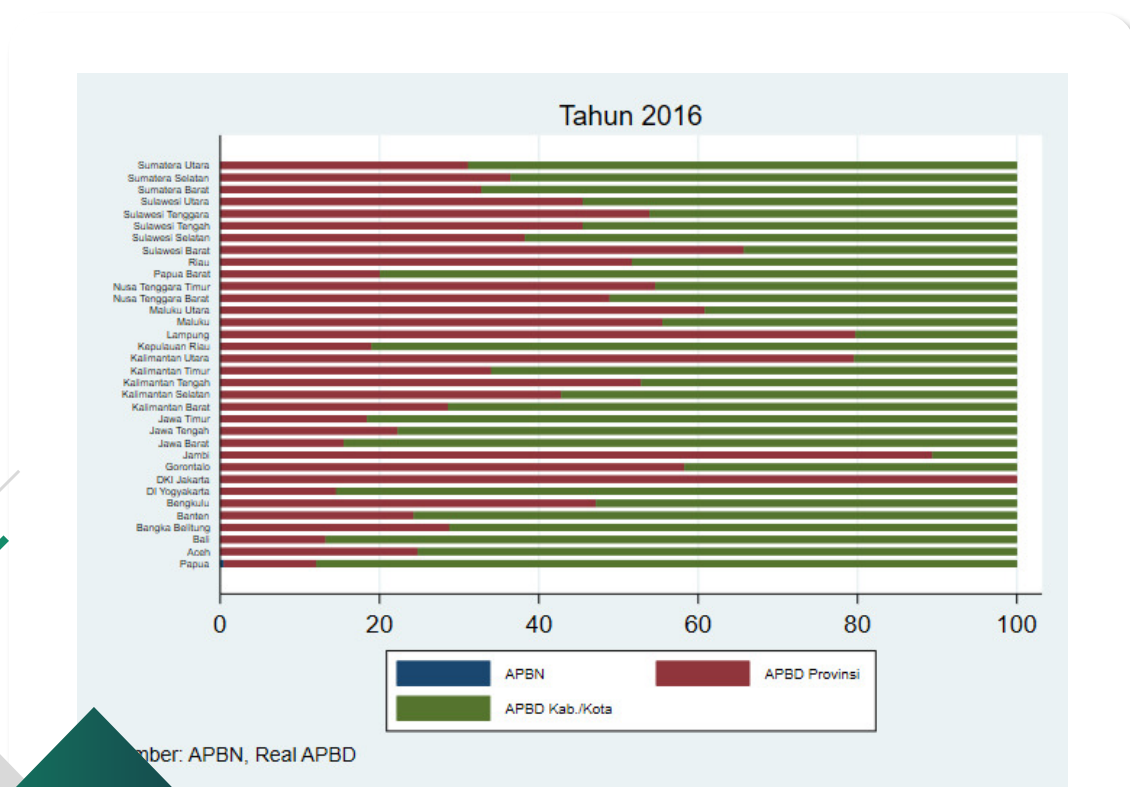
Sebelum tahun 2017, pendanaan stunting masih lebih banyak didanai dengan belanja APBD baik kabupaten kota maupun provinsi. Pada tahun 2017 terlihat belanja APBN melalui kementerian dan lembaga mulai lebih banyak mendanai belanja stunting dengan porsi secara umum lebih dari 30%. Pada 2018 terlihat penguatan belanja pemerintah pusat untuk tematik stunting dengan mayoritas lebih dari 40% pengeluaran pemerintah untuk bidang tersebut.

Bagan 5 Relevansi Sinergi Pendanaan Stunting

Regional Factors			
Urban	0.454 (0.008)	0.501 (0.007)	0.048*** (0.012)
Island			
Sumatra	0.21 (0.006)	0.188 (0.006)	-0.023*** (0.008)
Java	0.669 (0.007)	0.692 (0.007)	0.023** (0.009)
Kalimantan	0.05 (0.003)	0.049 (0.003)	-0.001 (0.003)
Bali and Nusa Tenggara	0.035 (0.003)	0.038 (0.003)	0.004 (0.003)
Sulawesi	0.036 (0.003)	0.034 (0.003)	-0.003 (0.003)
Observations	4247	4723	

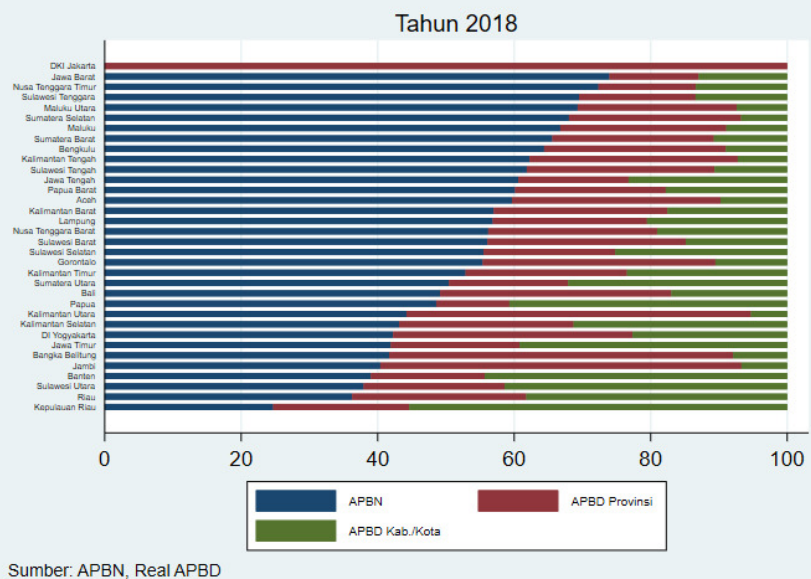
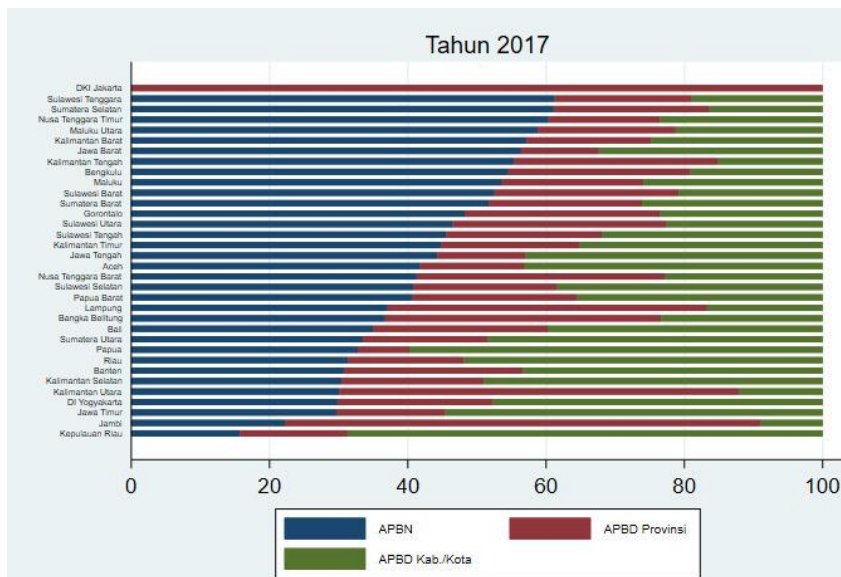
*/ Robust standard errors in parentheses; * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Bagan 4 Potret Pendanaan Stunting



KINERJA DAERAH

Bagan 4 Potret Pendanaan Stunting



Menggunakan gelombang data terbaru dari Indonesia Family Life Survey (IFLS), kami mempelajari perubahan prevalensi (parah) mengejutkan antara 2007, 2014 dan 2019 untuk anak-anak berusia 0-59 bulan dan kesesuaian sosial ekonomi mereka menggunakan indeks konsentrasi Erreygers (EI) dan dekomposisi berbasis regresi. Tim ekonomi DJPK² menemukan indikasi penurunan yang signifikan dalam tingkat stunting parah tetapi tidak dalam stunting, serta pengurangan yang signifikan dalam tingkat ketidaksetaraan absolut stunting. Analisis dekomposisi menunjukkan bahwa kekayaan rumah tangga, pendidikan ibu, penyampaian kelembagaan, dan ketersediaan irisan program ketidaksetaraan sosial ekonomi TKD/APBB merupakan sinergi yang berkontribusi paling besar bagi menurunkan prevalensi stunting (lihat Bagan-5).

2) Rizal M.F., van Doorslaer E. (2019). "Explaining the fall of socioeconomic inequality in childhood stunting in Indonesia." *SSM - Population Health*, 9, art. no. 10046

KINERJA DAERAH

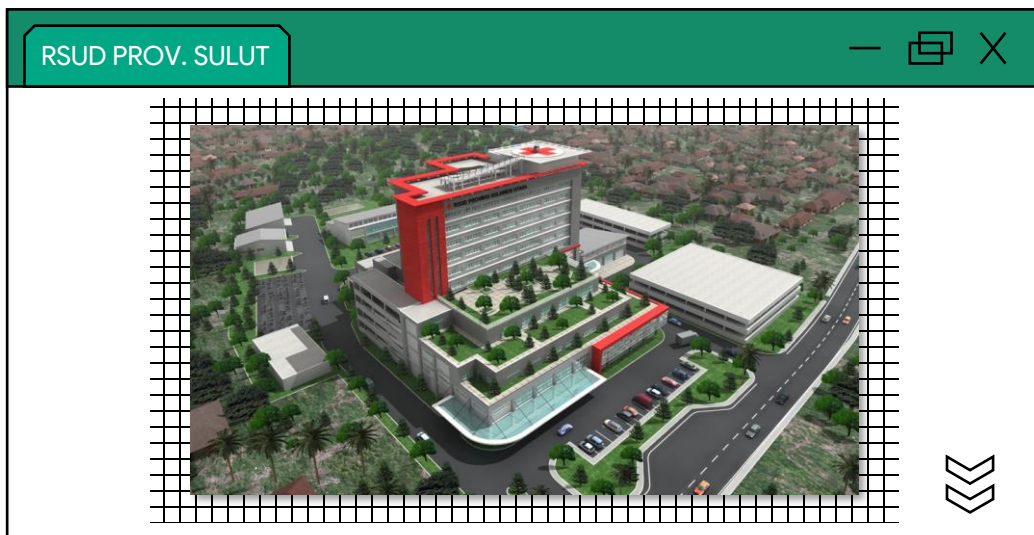
Simpulan

Analisis lebih lanjut tentang perubahan ketidaksetaraan dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa pengurangan asosiasi kekayaan dengan stunting dan peningkatan substansial akses perawatan kesehatan orang pra-sejahtera (seperti yang diproksi oleh imunisasi dan pengiriman kelembagaan) memainkan peran paling penting dalam mempersempit celah yang menonjol antara anak-anak yang lebih kaya dan pra-sejahtera.

Pertumbuhan ekonomi umum, pengurangan kepra-sejahteraan, dan implementasi program kesehatan dan sosial pro-pa-sejahtera selama periode yang diteliti seperti perluasan cakupan asuransi kesehatan untuk orang pra-sejahtera (Jamkesmas) dan program transfer tunai bersyarat (program Keluarga Harapan, PKH) adalah beberapa intervensi kebijakan sukses mengatasi stunting dari data yang diamati. Subset dari data juga menjelaskan peran sinergi pendanaan TKD dengan APBD sebagai kunci akselerasi pengentasan stunting pada periode data. Dengan UU nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD kiranya jelas potensi TKD dalam mengatasi stunting untuk mewujudkan Bonus Demografi untuk Indonesia Emas 2045 akan semakin signifikan dan relevan.



Pembangunan RSUD Provinsi Sulawesi Utara: Contoh Sinergi Pendanaan Pusat-Daerah






Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dalam ambisinya untuk bertransformasi menjadi negara maju, adil, dan makmur. Isu mengenai produktivitas, daya saing, dan demografi merupakan beberapa potret tantangan fundamental yang perlu untuk dikelola dengan baik dan hati-hati. Cita-cita menjadi negara maju tersebut tentu memerlukan banyak kelengkapan, utamanya dalam mendukung penanganan isu-isu fundamental tersebut serta agar dapat memberikan dampak bagi perekonomian dan terlaksananya berbagai agenda pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Salah satu kelengkapan tersebut adalah pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang diharapkan dapat menjadi akselerator pencapaian target-target pembangunan.

Pembangunan infrastruktur merupakan sebuah prioritas dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar dan peningkatan produktivitas serta daya saing. Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur khususnya di daerah, dihadapkan pada berbagai **tantangan** antara lain : (i) besarnya kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, dimana pada RPJMN 2020-2024, **indikasi kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur mencapai Rp6.445 Triliun** (ii) **alokasi belanja modal yang relatif rendah**, (iii) **proyek infrastruktur belum direklasifikasi berdasarkan jenis investasinya**, sehingga sulit untuk menyusun prioritas dan sumber pendanaannya, (iv) **belum optimalnya pelibatan stakeholder lain**.

Pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan, salah satunya melalui fasilitas rumah sakit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas serta pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendorong Pemprov Sulut untuk meningkatkan fasilitas kesehatan yang dimiliki melalui pembangunan RSUD Provinsi Sulawesi Utara. Pembangunan RSUD ini sangat penting mengingat Provinsi Sulawesi Utara belum memiliki infrastruktur rumah sakit rujukan provinsi sehingga rujukan pelayanan kesehatan dari RS kabupaten/kota atau 4 (empat) RS rujukan regional akan langsung dirujuk ke RSUP Prof. Dr. RD Kandou yang merupakan rumah sakit rujukan nasional.

INOVASI DAERAH

Konsep sinergi pendanaan ini sejatinya sudah mulai dimanfaatkan oleh beberapa daerah, salah satunya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada proyek pembangunan RSUD Provinsi. Pada proyek tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan sinergi pendanaan yang terdiri dari APBD, APBN (Belanja K/L, DAK, Pinjaman PEN Daerah), Hibah, dan Pinjaman PT SMI (Persero) dengan peruntukannya masing-masing terhadap anggaran pembangunan sebesar Rp 304 miliar yang telah rampung di Juni 2021. **Pada aspek pendanaan, pemerintah diperkirakan hanya dapat memberikan kontribusi hingga 37% dari total kebutuhan pendanaan infrastruktur tersebut, sedangkan sisanya diharapkan dapat dipenuhi oleh BUMN dan pelibatan pihak swasta.** Hal ini tentu merupakan tantangan yang sangat besar, khususnya bagi pemerintah daerah yang harus mencapai berbagai target pembangunan dan mengejar ketertinggalan ditengah-tengah keterbatasan kapasitas fiskal yang dimilikinya. Untuk itu, diperlukan adanya sinergi pendanaan dari berbagai stakeholder penyedia sumber pendanaan untuk dapat diintegrasikan dalam berbagai agenda pembangunan.

PENYIAPAN PROYEK	PELAKSANAAN PROYEK	OPERASIONAL RSUD	  
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Studi Kelayakan – PT SMI ▶ Masterplan – APBD ▶ DED – PDF (Hibah SECO) ▶ Amdal – PDF (Hibah SECO) ▶ Perpindahan Pasien Lama – APBD 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Manajemen Konstruksi – APBD ▶ Konstruksi – Pinjaman PT SMI (Rp 290 M) <ul style="list-style-type: none"> ○ RIDF – World Bank (Rp145 M) ○ RIDF – AIB (Rp145 M) ▶ Penyelesaian <i>landscaping</i> – Pinjaman PEN Daerah 2020 ▶ Penambahan layanan pelengkap – Pinjaman PEN Daerah 2021 ▶ Interior – APBD ▶ Alat Kesehatan – APBD dan DAK 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Biaya Operasional – APBD ▶ Pelatihan Dokter – APB 	<p>STATUS Kontruksi 100%</p> <p>PROYEK Pembangunan RSUD Provinsi Sulawesi Utara</p> <p>KOMITMEN PINJAMAN Rp300 M</p> <p>TENOR 5 Tahun</p> <p style="text-align: right;"><small>Sumber: PT SMI (Persero)</small></p>

Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan sinergi pendanaan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam pemenuhan target-target pembangunan di daerah. Namun, dalam melaksanakan konsep sinergi pendanaan tersebut, komitmen Pemerintah Daerah mutlak dibutuhkan sebagai bentuk kehadiran daerah dalam meyakinkan stakeholder terkait sehingga mampu memobilisasi pendanaan non-APBD di bidang infrastruktur daerah. RSUD Sulawesi Utara mempunyai banyak pelayanan kesehatan unggulan seperti ginjal, penyakit dalam dan lainnya. Pengelola RSUD perlu memaksimalkan pelayanan. dan pengelolaan yang diharap bisa menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelola RSUD berharap bisa menyumbang PAD Rp 100 miliar dari operasionalnya setiap tahun.

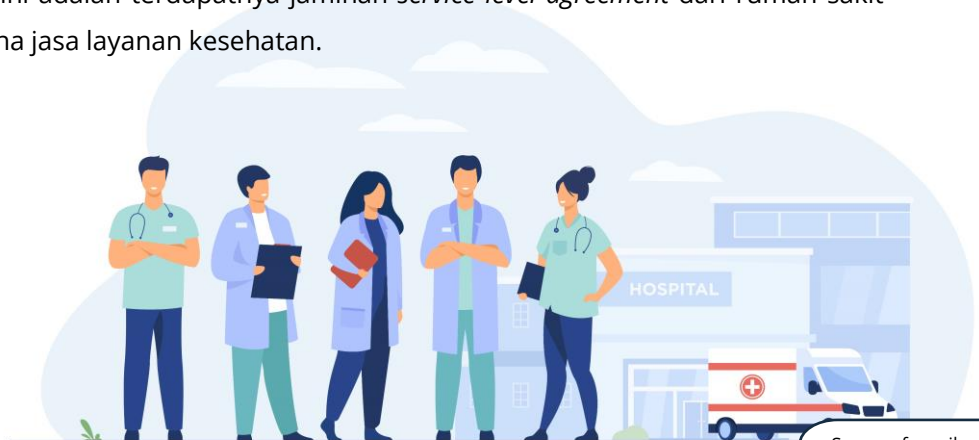
INOVASI DAERAH

Kontribusi PAD dari jasa layanan kesehatan didukung oleh teori retribusi Lindahl yang diajukan oleh Erik Lindahl, seorang ekonom dari Swedia. Idennya adalah untuk **mengenakan pajak kepada individu, untuk penyediaan barang publik, sesuai dengan manfaat marjinal yang mereka terima**. Sulit untuk menentukan berapa banyak orang yang harus membayar dan berapa nilai nominal yang layak. Lindahl mengembangkan teori tentang bagaimana biaya utilitas publik dapat disinergikan pendanaannya.



Argumennya adalah bahwa **orang akan membayar barang publik sesuai dengan cara mereka mendapat manfaat**. Semakin banyak orang mendapat manfaat dari barang-barang ini, semakin tinggi jumlah yang mereka bayar. Orang lebih bersedia membayar barang yang mereka hargai. Pajak diperlukan untuk mendanai barang publik dan masyarakat bersedia menanggung beban jasa layanan. Selain itu, teori ini memikirkan

kesediaan orang untuk membayar barang dan jasa layanan publik. Dari kenyataan bahwa barang publik dibayarkan melalui retribusi/perpajakan sesuai dengan ide Lindahl, tugas dasar pemerintahan daerah adalah memberi layanan dan dan utilitas publik yang dalam banyak kasus adalah bagian dari banyak kegiatan pemerintah yang melibatkan pemerintah murni untuk kepuasan publik dan bukan pembentukan keuntungan. Hal ini dapat dijustifikasi bilamana tujuan utama pengenaan retribusi jasa layanan kesehatan adalah untuk memulihkan beban penyediaan jasa layanan dengan margin normal, dan bukanlah motif penerimaan semata. Di antara bukti argumen ini adalah terdapatnya jaminan *service level agreement* dari rumah sakit kepada pasien pengguna jasa layanan kesehatan.



INOVASI DAERAH

Penyediaan optimal Pareto dari suatu barang publik dalam suatu masyarakat terjadi ketika jumlah penilaian marjinal dari barang publik (median semua individu) sama dengan biaya marjinal untuk menyediakan barang publik itu. Penilaian marjinal ini, secara formal, tingkat marjinal substitusi relatif terhadap beberapa referensi barang pribadi, dan biaya marjinal adalah tingkat transformasi marjinal yang menggambarkan berapa banyak barang pribadi yang dikenakan biaya untuk menghasilkan unit tambahan dari barang publik, yang dalam hal ini layanan jasa kesehatan oleh RSUD. Hal ini kontras dengan kondisi optimalitas Pareto barang pribadi, yang menyamakan penilaian masing-masing konsumen atas barang pribadi dengan biaya produksi marjinalnya.

Sebagai contoh, pertimbangkan komunitas yang terdiri dari dua konsumen dan pemerintah sedang mempertimbangkan apakah akan membangun rumah sakit umum atau tidak. Satu pihak siap membayar hingga \$ 200 untuk penggunaannya, sementara yang lain bersedia membayar hingga \$ 100. Nilai total memiliki rumah sakit umum bagi komunitas adalah \$ 300. Jika layanan rumah sakit dapat diproduksi seharga \$ 225, masih ada surplus \$ 75 untuk memelihara gedung dan alat kesehatan. Karena menyediakan layanan yang bernilai masyarakat dengan biaya \$ 300 dengan biaya hanya \$ 225 terdapat eksternalitas positif bila pemerintah menyediakan sinergi pendanaan karena ada *willingness to pay* dari para pihak untuk menjadi PAD untuk kesinambungan layanan jasa kesehatan rumah sakit umum.

Teori klasik barang publik mendefinisikan efisiensi dalam kondisi ideal informasi lengkap, sebuah situasi asumsi Wicksell. Samuelson menekankan bahwa ini menimbulkan masalah untuk penyediaan barang publik yang efisien dalam praktik dan penilaian retribusi Lindahl yang efisien untuk membiayai barang publik, karena individu memiliki insentif untuk melaporkan *under-valued* seberapa besar mereka menghargai barang publik. Tantangan selanjutnya, terutama dalam desain mekanisme dan teori keuangan publik adalah mengembangkan bagaimana penilaian dan biaya sebenarnya dapat ditimbulkan dalam kondisi praktis informasi yang tidak lengkap, menggunakan perangkat seperti mekanisme Vickrey-Clarke-Groves. Dengan demikian, analisis yang lebih dalam tentang masalah jasa layanan publik dapat memotivasi banyak sinergi fiskal yang merupakan jantung dari teori ekonomi modern. Dengan adanya penguatan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan *stakeholder* terkait retribusi Lindahl, diharapkan agenda pembangunan infrastruktur di daerah dapat terlaksana untuk memenuhi kebutuhan dasar publik yang berkualitas dan meningkatkan produktivitas masyarakat, serta bersama-sama mencapai visi Indonesia Maju 2045.

Sinergi Pendanaan

Berdasarkan Musrenbang RPJMD Provinsi Jabar tahun 2018-2023, kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Jabar mencapai Rp861,9 triliun. Jumlah tersebut terbagi dalam urusan pemerintah pusat, Pemda Provinsi Jabar, dan pemkab/pemkot se-Jabar. Menurut Kepala Biro BUMD Investasi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jabar, kebutuhan pembiayaan infrastruktur dan kemampuan fiskal daerah memiliki *gap* yang jauh. Hal ini terjadi karena tren kemampuan APBD Provinsi Jabar sampai dengan tahun anggaran 2021 belum mencapai angka Rp45 triliun dan alokasi untuk belanja modal atau infrastruktur hanya pada kisaran 30 persen. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi, terobosan, dan kreativitas dalam mengembangkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah dengan melibatkan BUMD dalam pembangunan infrastruktur. BUMD harus berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjadi agen pembangunan. Selain mengoptimalkan peran BUMD, pengembangan alternatif pembiayaan harus melihat berbagai potensi sumber pendanaan. Salah satu potensi sumber pendanaan di Jabar adalah simpanan dana masyarakat yang mencapai Rp519 triliun per September 2021.

<https://www.jabarprov.go.id> (diunduh 29 April 2022)

Pada Rakernas Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Hotel Intercontinental, Jakarta, Selasa (29/3/2022), Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II mengatakan bahwa kita harus berupaya terus mendorong terbangunnya sinergisitas perencanaan pusat dan daerah yang lebih komprehensif dalam mendukung efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah. Sinergisitas ini dibutuhkan untuk menangani berbagai permasalahan, seperti minimnya sarana dan prasarana pengawasan, minimnya pendanaan program/kegiatan pengawasan dalam APBD, minimnya personel pengawasan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di daerah, serta wilayah laut yang perlu diawasi sangat luas namun sumber daya pengawasannya terbatas. Komitmen pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menyiapkan dukungan pendanaan terhadap pengembangan Prinsip Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Pengembangan itu dilakukan melalui pembinaan, pelatihan PPNS, maupun penyediaan sarana dan prasarana.

<https://www.harianterbit.com/nasional> (diunduh 29 April 2022)

Pada akhir Maret 2022, Menteri Keuangan menyebutkan bahwa pemerintah daerah bisa menggunakan instrumen utang sebagai salah satu sumber pembiayaan dan hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). UU HKPD telah *mendorong creative and sustainable financing* berbasis kerja sama melalui skema sinergi dengan melibatkan pemerintah daerah lainnya, swasta, belanja kementerian/lembaga, maupun BUMN/BUMD. Dengan begitu, *creative financing* tidak diartikan sebagai pembiayaan berbentuk utang saja. Meski daerah dapat melakukan pembiayaan kreatif guna mendukung pembangunan, namun aspek *prudentiality* masih ditekankan dalam UU HKPD. Misalnya, dengan mengatur batasan maksimal kumulatif pinjaman daerah dan batas maksimal defisit APBN yang dimasukkan sebagai bagian pengendalian dalam sinergi fiskal nasional. Jika daerah mau meminjam melebihi periodenya, boleh dilakukan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas.

<https://www.medcom.id> (diunduh 29 April 2022)

Sinergi Pendanaan

Pada 2022, Kemendikbudristek mengalokasikan dana *matching fund* sebesar Rp950 miliar. Melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III Provinsi DKI Jakarta, Kemendikbudristek menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kerja sama MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dengan pendanaan *matching fund*. Dengan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh perguruan tinggi, Kemendikbudristek akan meningkatkan produktivitas perguruan tinggi di DKI Jakarta, yaitu dengan konsorsium perguruan tinggi dan kolaborasi lintas-sektor yang didampingi LLDikti Wilayah III. Penggunaan *matching fund* memiliki prioritas dalam bidang ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, penguatan pariwisata, dan kemandirian kesehatan. Kemendikbudristek bersama Pemprov DKI Jakarta memberi kesempatan bagi dosen dan peneliti di lingkungan LLDikti Wilayah III menghasilkan karya solutif dengan memperoleh pendanaan *matching fund*. Misalnya, dalam penguatan sistem kesehatan masyarakat di DKI Jakarta pada masa pandemi, mereka membuat berbagai prototipe peralatan yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam hal penanganan limbah, pembuatan aplikasi untuk Pemprov dari Kampus-Kampus yang menjadi pusat *Artificial Intelligence*, hingga pengembangan pusat riset terapan.

<https://m.medcom.id/pendidikan/> (diunduh 29 April 2022)

Dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (28/01/2022), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyetujui rencana kerja sama Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat dengan Infrastructure Asia Singapura. Persetujuan itu sangat penting untuk program pembangunan infrastruktur daerah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menurut Gubernur, pembiayaan infrastruktur di Jawa Barat tidak akan cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang hanya mampu membiayai 20 persen. Karenanya harus mencari pendanaan alternatif. Melalui kerja sama tersebut, Singapura dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat dalam ruang lingkup *capacity building*, *market sounding*, dan *project structuring* yang berfokus pada sektor air minum, transportasi, persampahan, efisiensi energi, dan konektivitas digital. Infrastructure Asia Singapura merupakan organisasi noprofit Singapura dan telah berpengalaman dalam mendukung berbagai proyek KPBU di Kawasan Asia. Salah satu contohnya adalah ikut serta dalam membantu pembiayaan pembangunan di Tiongkok.

<https://www.jabarprov.go.id> (diunduh 29 April 2022)

Dalam rangka pengembangan usaha mikro melalui pembiayaan ultra mikro (UMi) di wilayah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP), menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Bupati Kabupaten Luwu Utara, bertempat di Kantor BLU-PIP, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Desember 2021. Pada kesempatan yang sama dilanjutkan juga dengan penandatanganan kerja sama antara Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan PIP dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Perjanjian kerja sama tersebut mengatur bahwa penerima manfaat pembiayaan UMi (debitur UMi) adalah pelaku UMKM yang memenuhi kriteria dan memperoleh manfaat Program Pemda Kabupaten Luwu Utara. Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Luwu Utara siap menyalurkan pendanaan dalam program pembiayaan UMi melalui alokasi dana Pemkab sebesar Rp1 miliar dan juga subsidi bunga bagi masyarakat pelaku usaha di Luwu Utara yang disalurkan oleh PT Pegadaian. Skema subsidi bunga yang diberikan oleh Pemkab Luwu Utara, memberikan kemudahan fasilitas pembiayaan menjadi semakin terbuka melalui produk pembiayaan skema bunga 0%. Program ini diharapkan dapat menjangkau para pelaku usaha ultra mikro di wilayah Kabupaten Luwu Utara, sehingga mereka (pelaku usaha UMi) dapat merasakan kemudahan akses permodalan, adanya subsidi bunga hingga 0% s.d. 31 Desember 2024 dengan plafon pinjaman paling tinggi Rp 20 juta. Selain menyalurkan pembiayaan UMi, terdapat juga program pelatihan yang diberikan kepada para pelaku UMKM dan penerima pembiayaan UMi yaitu pelatihan pencatatan keuangan, pemasaran, pengembangan produk, manajerial, dan bentuk pelatihan lainnya yang terkait dengan pengembangan UMKM.

<https://kabar24.bisnis.com> (diunduh 29 April 2022)



Sinergi Pendanaan Pembangunan Infrastruktur di Era Baru Desentralisasi Fiskal



Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal secara luas dan bertanggung jawab telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2001, di mana penyerahan sebagian kewenangan telah disertai dengan penyerahan sumber pendanaannya kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan

umum, dan daya saing daerah salah satu caranya melalui penyediaan infrastruktur publik (*public infrastructure provision*) di daerah. Berdasarkan struktur pendapatan pemerintah daerah, penyediaan layanan publik termasuk infrastruktur di daerah saat ini masih banyak mengandalkan Transfer ke Daerah (TKD). Alokasi belanja infrastruktur saat ini masih rendah sedangkan kebutuhan akan pembangunan infrastruktur di Indonesia sangatlah besar. Berdasarkan data dari Kementerian PPN/Bappenas, total investasi pembangunan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020-2024 adalah Rp 6.445 triliun. APBN/APBD hanya mampu mendanai sebesar 37% saja, sedangkan sisanya berasal dari BUMN dan swasta.

Untuk mengatasi keterbatasan fiskal dalam mendanai infrastruktur, pemerintah berupaya mendorong daerah untuk dapat menggunakan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangannya. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dengan Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia tanggal 24 Oktober 2017, bahwa dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur daerah, **diperlukan alternatif-alternatif pembiayaan di luar APBN dan APBD.**

Problematika kualitas belanja daerah selama ini terlihat pada masih staganannya komitmen penyediaan pendanaan daerah untuk mengutamakan pengeluaran infrastruktur layanan publik. Berdasarkan data APBD pada tahun 2022, sebagian besar belanja daerah digunakan untuk belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang jumlahnya mencapai Rp 747,79 triliun (62,5%) dari total belanja sedangkan untuk belanja modal hanya sebesar Rp 189,34 triliun (15,8%). Belanja modal yang diharapkan dialokasikan untuk investasi infrastruktur pun tidak sepenuhnya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur publik di daerah.

Untuk mengatasi problematika tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pemerintah mendorong perilaku disiplin penganggaran daerah dengan memperhatikan aspek kualitas belanja yang seimbang dan berkesinambungan antara belanja aparatur dan penyediaan layanan publik. Belanja pembangunan infrastruktur layanan publik yang memadai akan meningkatkan ketersediaan barang dan jasa publik kepada masyarakat (*public service delivery*). Hal ini diharapkan dapat mengakselerasi tujuan dari desentralisasi fiskal¹ antara lain, mengurangi kesenjangan layanan dasar publik antardaerah, mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, dan turut mendorong kesejahteraan serta pemerataan ekonomi masyarakat di daerah.

Sedangkan aspek tata kelola fiskal nasional didesain dalam rangka harmonisasi belanja pusat-daerah, integrasi, dan koordinasi sumber daya fiskal nasional dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*). Untuk mengimbangi permintaan (*demand*) infrastruktur layanan publik yang tinggi diperlukan terobosan penyediaan (*supply*) skema pendanaan proyek infrastruktur layanan publik yang kreatif dan berkelanjutan (*creative and sustainable financing*). Bagi daerah yang mengalami keterbatasan pendanaan didorong untuk mendesain proyek infrastruktur berbasis kerjasama² dan tidak menutup kemungkinan adanya peluang penyediaan bersama dari seluruh pemangku kepentingan di daerah (*co-production*)³.

Sinergi pendanaan dan harmonisasi belanja pembangunan infrastruktur tidak dapat dipisahkan dari siklus pengelolaan keuangan publik yang diawali dari tahap perencanaan dan inisiasi proyek. Pada tahap ini, integrasi desain, pembangunan, operasional dan pengelolaan suatu proyek infrastruktur diupayakan mengarah pada satu *single contract* yang sederhana namun komprehensif⁴ dan secara disiplin dilekatkan dengan ukuran-ukuran keberhasilan kinerja proyek. Dalam prakteknya, diperlukan *grand design* proyek infrastruktur yang terintegrasi berbasis program, proyek, target *output/outcome*, *locus*, dan sektor agar tidak terjadi pendanaan ganda pada satu proyek/kegiatan.



- 1 Shah, A. (2007). A framework for evaluating alternate institutional arrangements for fiscal equalization transfers. In *Fiscal Equalization* (pp. 141-162). Springer, Boston, MA.
- 2 Grimsey D. and Lewis M., 2005, 'Are public private partnerships value for money? Evaluating alternative approaches and comparing academic and practitioner views', *Accounting Forum*, 29, 345-78.
- 3 Bovaird, Tony. "Beyond engagement and participation: User and community coproduction of public services." *Public administration review* 67.5 (2007): 846-860.
- 4 Brewer G., Gajendran T., Jeffries M., McGeorge D., Rowlinson S. and Dainty A., 2013, 'Value through innovation in long-term service delivery: Facility management in an Australian PPP', *Built Environment Project and Asset Management*, 3, 74-88.

Pada dasarnya, **tujuan dari sinergi pendanaan adalah untuk mengatasi keterbatasan aspek ruang lingkup (*scope*), horizon waktu (*time*), dan biaya (*cost*) suatu proyek infrasktruktur**. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut dibutuhkan pengungkit (*leverage*) kemampuan pendanaan daerah dalam kapasitas besar untuk mendesain proyek infrastruktur yang proper dan program prioritas lainnya. Pada saat yang bersamaan, inovasi pendanaan tersebut mendesak dibutuhkan untuk menghindari kehilangan biaya kesempatan secara ekonomi (*opportunity and idle cost*). Sinergi pendanaan tersebut dapat bersumber dari bauran dan kombinasi pendanaan APBD (PAD, TKD, Pembiayaan Utang) dan Non APBD (BUMN/BUMD, KPBU, Kerja Sama Daerah, Belanja K/L).

Implementasi dari sinergi pendanaan pembiayaan infrastruktur daerah saat ini yang cukup sukses menjalankannya, antara lain pembangunan Rumah Sakit Anutapura Kota Palu. Pemerintah Kota Palu menyediakan anggaran dari APBD Murni selain pembiayaan daerah melalui pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI), selanjutnya Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan belanja K/L untuk peralatan medis. Selain itu juga berasal dari donor melalui kerja sama yang dilakukan dengan PT. SMI.



Bentuk praktek terbaik dari sinergi pendanaan berbasis grand design sektoral pembangunan di daerah yang saling terkoneksi antar simpul proyek infrastruktur serta menghindari pendanaan ganda (*overlap*) adalah pembangunan perekonomian daerah berdasarkan lokus destinasi wisata. Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur perlu mendapat dukungan DAK Fisik Pembangunan KSPN Borobudur DSKT. Tidak menutup kemungkinan juga dapat disinergikannya pendanaan lain seperti DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kesehatan, Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BPLS), UMKM, ada pinjaman pembangunan pasar dan sektor lain, serta hibah untuk mendukung kawasan inti dari infrastruktur pariwisata tersebut.

Keterlibatan semua pihak sangat diperlukan dalam pembangunan di daerah. Menurut Shergold (2004)⁵ konsep *Whole of Government* (WoG) menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu publik. Dengan kebijakan sinergi pendanaan proyek infrastruktur layanan publik diharapkan dapat mendorong inovasi pengembangan kebijakan yang responsif, manajemen program yang akuntabel dan pemberian layanan yang *equal* kepada masyarakat. Melalui pembiayaan yang kreatif (*creative financing*) di era baru desentralisasi ini diharapkan dapat memperkuat partisipasi dan kepemilikan (*ownership*) semua pihak dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah serta DPRD, swasta atau badan usaha, maupun masyarakat.

⁵ Shergold, P. (2004). Connecting Government: whole of Government responses to Australia's priority challenges. Canberra Bulletin of Public Administration, (112), 11-14.

Relevansi Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 dalam Meminimalkan Deviasi Penurunan Pertumbuhan PDRB dari Trajektori Ekonomi Potensial Pasca Pandemi COVID 2019



Latar Belakang

Merujuk survei ekonomi Indonesia tahun 2021 oleh OECD, **Covid-19 mendisrupsi dua dekade pertumbuhan yang stabil**. Pandemi memotong pendek trajektori pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di mana PDB per kapita meningkat dari 19% dari rata-rata OECD pada tahun 2001 menjadi 29% pada 2019. Kontribusi Indonesia terhadap PDB ASEAN juga berlipat ganda selama periode yang sama dari 17% menjadi 35%. Distrupsi trajektori pertumbuhan PDB saat ini **berisiko mendorong hingga 10 juta orang ke dalam kemiskinan**, menambah 26 juta yang telah diklasifikasikan sebagai orang miskin ketika virus menghantam di awal 2020.

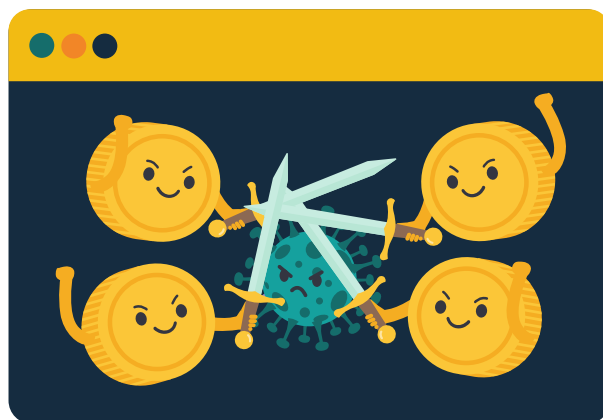
Proponen teori pertumbuhan endogen Schumpeter menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terutama merupakan hasil dari kekuatan internal, bahwa peningkatan dalam produktivitas dapat dikaitkan langsung dengan inovasi yang lebih cepat dan lebih banyak investasi dalam sumber daya manusia. Dengan demikian untuk ekonomi berkembang layaknya Indonesia, kiranya **penting untuk menjaga kemampuan inovasi** yang paling tidak ditandai dengan penyerapan tenaga kerja dan bahan baku lokal agar tidak melenceng jauh di bawah trajektori pertumbuhan potensial ekonomi. Memasuki pandemi di 2020, **kekurangan keterampilan dan pengangguran pemuda yang tinggi sempat menjadi perhatian pemerintah**.

Relevansi Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 dalam Meminimalkan Deviasi Penurunan Pertumbuhan PDRB dari Trajektori Ekonomi Potensial Pasca Pandemi COVID 2019

Latar Belakang

Analisis ini menguji hipotesis bahwa **meningkatkan pendidikan kejuruan dan pelatihan orang dewasa, dengan penekanan pada keterampilan digital dapat menjaga kemampuan pertumbuhan endogen nasional** untuk tidak terdeviasi jauh dari trajektori potensial ekonomi. Pendidikan anak usia dini yang lebih baik juga dapat meningkatkan literasi ibu rumah tangga dan membantu mengurangi ketidaksetaraan gender. Selain itu, mendapatkan lebih banyak orang - terutama wanita, migran internal, dan pekerja asing ke dalam pekerjaan akan menjadi kunci untuk mengurangi tekanan populasi yang menua.

Pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19 mempengaruhi aktivitas ekonomi di daerah dalam hal **penurunan produktivitas dan pendapatan** sektor-sektor usaha secara agregat. Hal ini berdampak juga pada turunnya penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2020 yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun tranfer dari pemerintah pusat. Akibatnya adalah adanya **penundaan atau penghapusan beberapa kegiatan/proyek** tahun 2020 yang sudah direncanakan terkena kebijakan *refocusing* dan realokasi khususnya untuk belanja modal. Berdasarkan laporan penyesuaian APBD DJPK, Kemenkeu, **jumlah realokasi mencapai sejumlah Rp72.450** miliar yaitu anggaran untuk kesehatan sebesar Rp30.406,3 miliar, anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp22.802,9 miliar dan anggaran untuk dukungan ekonomi sebesar Rp19.240,8 miliar.



Selain itu, Pemerintah Pusat memberikan bantuan berupa **Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (Pinjaman PEN) sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur** untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah. Dengan adanya pendanaan dari luar APBD berupa pinjaman diharapkan pembangunan infrastruktur daerah yang telah direncanakan sebelum Pandemi Covid-19 dapat dilanjutkan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Saat pandemic 2020, **jumlah pinjaman yang telah diberikan adalah sebanyak Rp19,131 triliun** kepada 28 Pemerintah Daerah yang semuanya dalam bentuk pinjaman kegiatan atau proyek. Sesuai dengan PMK 105 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dimana Pinjaman PEN diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial, penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri/lokal, serta penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal dari Pinjaman Kegiatan. Hal ini perlu dilakukan evaluasi mengingat dana PEN yang tidak sedikit dan potensi PEN ini dapat menjadi stimulus kebangkitan ekonomi daerah dan nasional. Oleh karena itu, **kajian ini dilakukan untuk mengetahui dampak Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020** kepada Pemulihan Ekonomi di Daerah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

KAJIAN PILIHAN

Relevansi Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 dalam Meminimalkan Deviasi Penurunan Pertumbuhan PDRB dari Trajektori Ekonomi Potensial Pasca Pandemi COVID 2019

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **metode kombinasi (mixed methods) yaitu metode kualitatif dan kuantitatif**. Strategi yang digunakan dalam metode campuran ini adalah metode campuran sekuensial/paralel (sequential mixed methods). Strategi eksplanatoris sekuensial ini lebih memprioritaskan pada data kuantitatif. **Data kuantitatif berasal dari kuisioner** yang disampaikan ke Pemerintah Daerah penerima Pinjaman PEN Daerah. Sedangkan, **data kualitatif diperoleh melalui wawancara langsung** kepada Pemerintah Daerah serta melalui Forum Group Discussion (FGD). Analisis data dalam penentuan dampak akan dilakukan dengan menggunakan Analisis Difference in Difference (DiD) untuk mengetahui besaran perubahan dari sebelum dan setelah adanya treatment Pinjaman PEN dan Analisis Input Output (Analisis IO) untuk mengetahui multiplier effect yang ditimbulkan dari pemberian Pinjaman PEN tersebut dengan menggunakan data tabel IO berasal dari Badan Pusat Statistik.



Hasil Kajian dan Rekomendasi

Melalui serangkaian proses metodologi penelitian dan olah data, kajian ini menyimpulkan bahwa Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 telah memberikan support/dampak yang positif terhadap pemulihan ekonomi daerah yang dapat dilihat dari:

1 Persepsi dari Pemerintah Daerah dimana Pinjaman PEN Daerah telah memberikan *support/dampak* yang positif terhadap pemulihan ekonomi di daerah.

2 Dengan menggunakan analisis *Difference in Difference*, dan berdasarkan data realisasi belanja modal tahun 2020, **Pinjaman PEN Daerah memberikan dukungan terhadap peningkatan rata-rata belanja modal** yang turun sebagai dampak pandemi, sebesar 2.33 kali lebih besar kepada daerah penerima dibandingkan daerah lain (daerah yang tidak mendapatkan pinjaman PEN Daerah)

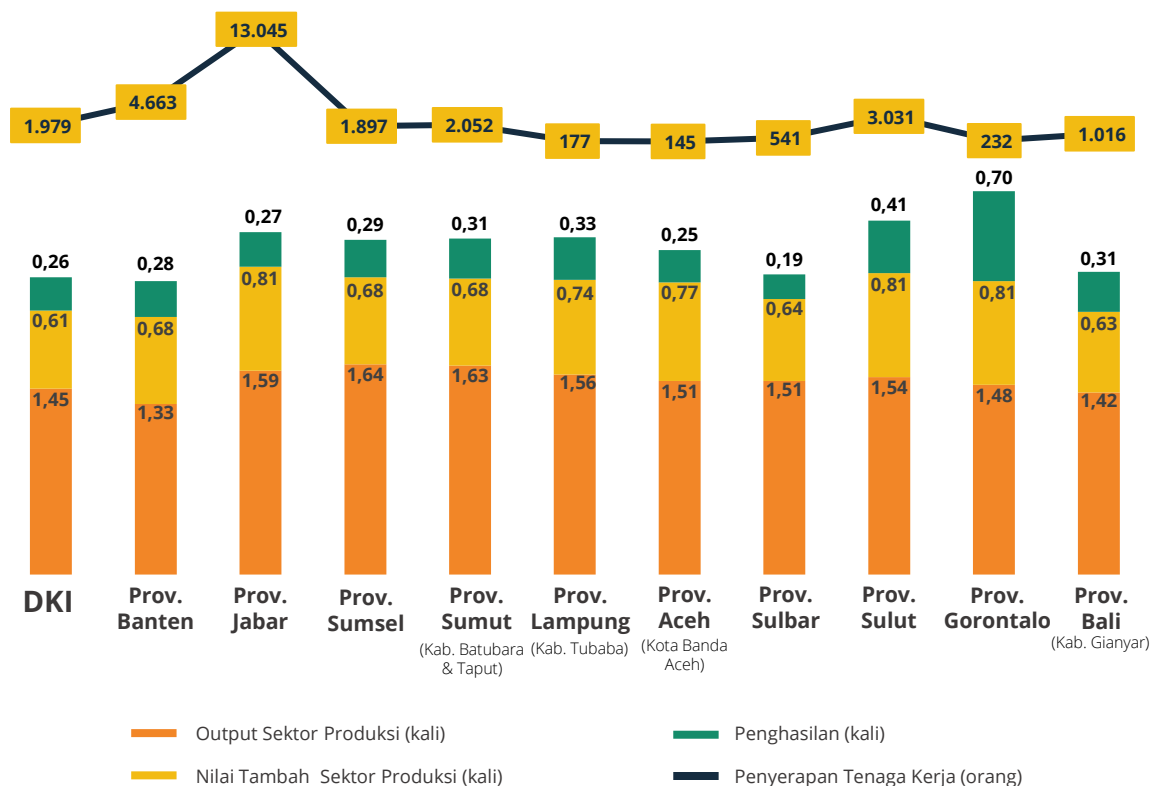
3 Dengan menggunakan analisis *Input Output* (IO) provinsi berdasarkan tabel *Inter Regional Input Output* (IRIO) dari BPS dan data dari 12 Daerah, **Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020** memberikan dampak ke seluruh sektor produksi dan **memberikan efek pengganda (*multiplier effect*)** terhadap output, nilai tambah sektor produksi, pendapatan/upah tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja.

KAJIAN PILIHAN

Relevansi Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 dalam Meminimalkan Deviasi Penurunan Pertumbuhan PDRB dari Trajektori Ekonomi Potensial Pasca Pandemi COVID 2019

Hasil Kajian dan Rekomendasi

➤ *Multiplier Effect* terhadap Output, Nilai Tambah Sektor Produksi, Upah Tenaga Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja



Berdasarkan perbandingan antara perhitungan penyerapan tenaga kerja menggunakan analisis IO Provinsi, dan data realisasi penggunaan tenaga kerja, proyek yang dibiayai dari pinjaman PEN Daerah telah memaksimalkan penggunaan tenaga kerja sehingga sudah sesuai dengan kriteria Pemberian Pinjaman PEN Daerah yaitu penyerapan tenaga kerja lokal untuk mengurangi pengangguran akibat Pandemi Covid-19.

Dengan menggunakan analisis *Difference in Difference* dan berdasarkan data laporan indikator konstruksi triwulan IV 2020 yang diterbitkan BPS, provinsi yang daerahnya mendapatkan pinjaman PEN Daerah (Daerah *Treatment*) mengalami peningkatan indeks order bahan bangunan/material dan komponen lainnya 3,53 kali lebih besar dibandingkan provinsi yang daerahnya tidak mendapatkan pinjaman PEN Daerah (Daerah *Kontrol*). Hal ini menunjukkan, bahwa terdapat peningkatan permintaan bahan baku lokal yang lebih besar pada daerah penerima Pinjaman PEN.

4

Relevansi Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 dalam Meminimalkan Deviasi Penurunan Pertumbuhan PDRB dari Trajektori Ekonomi Potensial Pasca Pandemi COVID 2019

Hasil Kajian dan Rekomendasi

Secara umum, pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah tahun 2020, sudah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa **kendala yang dihadapi** yaitu:

- a. **Penyerapan pinjaman yang kurang optimal** yang disebabkan antara lain adanya efisiensi lelang, waktu pelaksanaan kegiatan yang singkat, kendala teknis pelaksanaan kegiatan, dan dokumen penarikan pinjaman mendahului penandatanganan perjanjian pinjaman.
- b. **Kendala SDM Pemerintah Daerah** yang kurang memahami mekanisme teknis pengelolaan Pinjaman PEN Daerah.

Rekomendasi yang dapat disampaikan untuk perbaikan pelaksanaan Pinjaman PEN kedepan yaitu sebagai berikut:

- a. **Melakukan analisis yang mendalam** pada saat melakukan proses screening kegiatan yang diusulkan khususnya yang terkait kapasitas daerah untuk melaksanakan proyek, mitigasi resiko teknis pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan pendahuluan yang sudah dilakukan terkait pelaksanaan proyek.
- b. **Meningkatkan koordinasi dan asistensi dengan Pemerintah Daerah** agar SDM Pemerintah Daerah dapat lebih memahami mekanisme teknis pengelolaan Pinjaman PEN Daerah.

Relevansi Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 dalam Meminimalkan Deviasi Penurunan Pertumbuhan PDRB dari Trajektori Ekonomi Potensial Pasca Pandemi COVID 2019

Hasil Kajian dan Rekomendasi

Selain itu, sedikit ekstensi aljabar dari hasil IRIO di atas untuk pajak mengindikasikan bahwa pandemi juga telah menggarisbawahi **perlunya aksi mendesak untuk mereformasi pendapatan pajak Indonesia** yang tercatat lebih rendah dibandingkan rerata peers di Asia Tenggara maupun OECD. Kepatuhan pajak yang belum optimal, pengecualian pajak dan penurunan tarif yang meluas, dengan kurang dari 8 juta orang membayar pajak penghasilan pribadi, berarti rasio pajak terhadap PDB Indonesia hanya 11,9% pada tahun 2018, jauh di bawah rata-rata OECD 34,3% dan setengahnya tinggi lebih tinggi seperti di negara-negara berkembang G20.

Pemerintah memperkirakan pendapatan pajak mungkin turun 20% pada tahun 2020. Setelah ekonomi keluar dari pandemi, normalisasi efek harga abnormal komoditas mengindikasikan perlunya menaikkan lebih banyak pendapatan dari pajak properti - yang di Indonesia hanya berkontribusi 2% dari pendapatan pajak dibandingkan 6% di rerata OECD - dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan kekayaan sambil berkontribusi pada anggaran pemerintah daerah. Meningkatkan tarif pajak yang dipilih - misalnya, pada tembakau - serta memperluas basis pajak, menutup celah dan meningkatkan kepatuhan terhadap pajak penjualan juga dapat membantu menopang pendapatan.

